



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 170 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KAMPUNG TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Kampung yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tata cara penetapan, pengalokasian dan Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 12 Seri A);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kampung adalah penghulu dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
9. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Pejabat penghulu selanjutnya disingkat Pj Penghulu adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban Penghulu dalam waktu tertentu.

11. Badan permusyawaratan kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara badan permusyawaratan kampung, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
14. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kampung.
15. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
18. Pedoman Pengelola Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
19. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada kampung dengan persentase tertentu yang bersumber dari penerimaan pajak daerah.
20. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat DBHRD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada kampung dengan persentase tertentu yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah.
21. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi yang dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung yang dibagi secara merata kepada seluruh kampung.
22. Alokasi Proporsional yang selanjutnya disingkat AP alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap kampung dibagi jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah seluruh kampung dan dikali 40% (empat puluh perseratus) dari pagu dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap kampung dalam tahun anggaran.
23. Rekening kas umum daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening kas kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah kampung yang ditentukan oleh Penghulu untuk menampung seluruh penerimaan kampung dan membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
28. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
30. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
31. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
32. Rencana pembangunan jangka menengah kampung yang selanjutnya disingkat RPJM kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 1 (satu) kali masa jabatan penghulu.
33. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam pelaksanaan DBHPD dan DBHRD kepada kampung tahun 2026.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai dasar dalam penetapan besaran DBHPD dan DBHRD pada setiap kampung;
- b. sebagai dasar dalam pengalokasian DBHPD dan DBHRD setiap Kampung; dan
- c. memberikan pedoman kepada pemerintah kampung terkait penetapan dan arah penggunaan DBHPD dan DBHRD.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 4

DBHPD dan DBHRD kepada kampung tahun 2026 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain sesuai dengan kewenangan Kampung.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Siak mengalokasikan DBHPD dan DBHRD kepada kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan DBHPD dan DBHRD Kabupaten.
- (3) Pagu DBHPD kepada kampung tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp.21.845.000.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Pagu DBHRD kepada kampung tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp.2.025.868.200,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Penetapan rincian DBHPD dan DBHRD kepada kampung untuk setiap kampung di kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dana dalam penetapan besaran DBHPD dan DBHRD dalam tahun berjalan, maka tata cara pengalokasian dan penetapan dana dimaksud dihitung berdasarkan persentase (%) jumlah dana yang bertambah dan/atau berkurang dan berlaku bagi seluruh kampung.
- (2) Dalam hal berkurangnya penerimaan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berjalan maka penyaluran DBHPD dan DBHRD disesuaikan dengan persentase pengurangan dimaksud.

Bagian Kedua Pembagian DBHPD

Pasal 7

- (1) DBHPD kepada kampung dialokasikan dengan ketentuan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu DBHPD tahun 2026 dan dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan
 - b. Alokasi Proporsional (AP) yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DBHPD tahun 2026 dan dibagi secara proporsional berdasarkan persentase bobot dari realisasi penerimaan DBHPD masing-masing kampung.

- (2) Penghitungan AD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$\text{AD Kampung} = \frac{60\% \times \text{Pagu DBHPD Tahun 2026}}{122 \text{ Kampung}}$$
- (3) Penghitungan AP setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$\text{AP Kampung} = 40\% \times \text{pagu DBHPD} \times \frac{\text{realisasi penerimaan DBHPD setiap kampung}}{\text{jumlah penerimaan DBHPD seluruh Kampung}}$$
- (4) Pembagian DBHPD kepada kampung tahun 2026 menggunakan rumus sebagai berikut : DBHPD = (AD + AP).
- (5) Data pajak untuk penghitungan Alokasi Proporsional (AP) setiap kampung bersumber dari Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten siak dan merupakan akumulasi dari jenis pajak antara lain :
- pajak restoran;
 - pajak hotel
 - pajak hiburan;
 - pajak walet;
 - pajak air tanah
 - pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB);
 - pajak reklame;
 - pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - pajak pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB);
 - pajak penerangan jalan (PPJ);

Bagian Ketiga Pembagian DBHRD

Pasal 8

- (1) DBHRD kepada kampung dialokasikan dengan ketentuan :
- Alokasi Dasar (AD) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu DBHRD tahun 2026 dan dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan
 - Alokasi Proporsional (AP) yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DBHRD tahun 2026 dan dibagi secara proporsional berdasarkan persentase bobot dari realisasi penerimaan DBHRD masing-masing kampung.
- (2) Penghitungan AD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$\text{AD Kampung} = \frac{60\% \times \text{Pagu DBHRD Tahun 2026}}{122 \text{ Kampung}}$$
- (3) Penghitungan AP setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$\text{AP Kampung} = 40\% \text{ pagu DBHRD} \times \frac{\text{realisasi penerimaan DBHRD setiap kampung}}{\text{jumlah penerimaan DBHRD seluruh Kampung}}$$
- (4) Pembagian DBHRD kepada kampung tahun 2026 menggunakan rumus sebagai berikut : DBHRD = (AD+ AP).
- (5) Data retribusi untuk penghitungan Alokasi Proporsional (AP) setiap kampung bersumber dari Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten siak dan merupakan akumulasi dari jenis Retribusi Daerah.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung.
- (2) Penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada kampung dilakukan secara bersamaan dalam satu permohonan kampung.
- (3) Penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana oleh pemerintah kabupaten dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada kampung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala BKD menyampaikan surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung kepada Kepala DPMK;
 - b. Kepala DPMK menyurati Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya menginformasikan kepada Pemerintah Kampung agar mengajukan berkas permohonan penyaluran dana;
 - c. Kepala DPMK menerbitkan nota dinas permohonan penyaluran dana DBHPD dan DBHRD dan mengajukannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak untuk dimintakan persetujuan;
 - d. Penghulu mengajukan berkas permohonan penyaluran dana DBHPD dan DBHRD kepada Bupati c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak setelah dilakukan verifikasi oleh Tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - e. DPMK melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan penyaluran dana ADK dan mengajukan permohonan penyaluran dana DBHPD dan DBHRD kepada BKD untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran dana; dan
 - f. dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Penghulu.
- (5) Penyaluran dana yang berada di RKK/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung.
- (6) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.

Pasal 10

- (1) Dokumen berkas persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD dari Pemerintah Kampung kepada Tim Verifikasi/Evaluasi Kecamatan dan DPMK untuk tahap pertama, yaitu :
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung tahun sebelumnya;
 - b. surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) penghulu;
 - c. nota dinas penyaluran dana;
 - d. kartu tanda penduduk (KTP) penghulu/Pj. penghulu;
 - e. surat permohonan penyaluran dana;
 - f. surat pengantar kecamatan;
 - g. lembar verifikasi administrasi kelengkapan spj dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung tahun sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat kecamatan;

- h. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung tahap I yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat kecamatan;
 - i. rekening koran terakhir;
 - j. sp2d terakhir;
 - k. specimen penghulu dan bendahara kampung;
 - l. buku cek kampung;
 - m. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dokumen berkas persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD dari Pemerintah Kampung kepada Tim Verifikasi/Evaluasi Kecamatan dan DPMK untuk tahap selanjutnya:
- a. surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) penghulu;
 - b. nota dinas penyaluran dana;
 - c. kartu tanda penduduk (KTP) penghulu/Pj. penghulu;
 - d. surat permohonan penyaluran dana;
 - e. surat pengantar kecamatan;
 - f. lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ DBHPD dan DBHRD kepada Kampung tahap sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - g. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana DBHPD dan DBHRD kepada Kampung yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - h. rekening koran terakhir;
 - i. sp2d tahap sebelumnya;
 - j. laporan realisasi APBKampung tahap sebelumnya; dan
 - k. persyaratan lainnya dengan peraturan berlaku.
- (3) Format Surat Permohonan Penyaluran Dana, Surat Pengantar Kecamatan, lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada Kampung tahap I (pertama) dan lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD kepada Kampung tahap selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran DBHPD dan DBHRD dari DPMK kepada BKD sebagai berikut:
- a. surat permohonan permintaan dana beserta lampiran;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kepala dpmk kabupaten siak;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) penghulu;
 - d. nota dinas penyaluran dana; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

Proses penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung dapat dilakukan secara manual atau *online* (tergantung ketersediaan aplikasi dan jaringan).

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan DBHPD dan DBHRD kepada kampung terdiri dari laporan bulanan, semesteran dan laporan akhir tahun.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBKampung dan sesuai dengan format realisasi pada aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban DBHPD dan DBHRD kepada kampung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Dalam hal penghulu tidak mengajukan permohonan penyaluran dan laporan pelaksanaan dana DBHPD dan DBHRD sampai akhir tahun anggaran, maka DBHPD dan DBHRD kepada kampung menjadi sisa di RKUD kabupaten Siak.
- (3) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan penggunaan DBHPD dan DBHRD kepada kampung dilakukan oleh DPMK, Inspektorat, Kecamatan, BAPEKAM dan masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 170

PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

KEPADA KAMPUNG SE - KABUPATEN SIAK

TAHUN ANGGARAN 2026

No.	KECAMATAN / KAMPUNG	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KAMPUNG				
		ALOKASI DASAR (60%) (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			DANA BAGI HASIL PAJAK SETIAP KAMPUNG (Rp.)
			REALISASI PENERIMAAN PAJAK SETIAP KAMPUNG (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
1	Siak					
1	Langkai	107,434,426	99,855,463	0.55%	48,225,822	155,660,000
2	Tumang	107,434,426	48,709,243	0.27%	23,524,434	130,959,000
3	Merempan Hulu	107,434,426	180,266,583	1.00%	87,060,876	194,495,000
4	Rawang Air Putih	107,434,426	64,022,765	0.35%	30,920,196	138,355,000
5	Suak Lanjut	107,434,426	114,275,774	0.63%	55,190,201	162,625,000
6	Buantan Besar	107,434,426	540,540,028	2.99%	261,057,195	368,492,000
					-	-
2	Sungai Apit				-	-
1	Teluk Lanus	107,434,426	32,166,118	0.18%	15,534,828	122,969,000
2	Tanjung Kuras	107,434,426	47,919,960	0.26%	23,143,245	130,578,000
3	Parit I/II	107,434,426	56,493,408	0.31%	27,283,846	134,718,000
4	Teluk Masjid	107,434,426	61,410,313	0.34%	29,658,496	137,093,000
5	Sungai Kayu Ara	107,434,426	42,833,224	0.24%	20,686,574	128,121,000
6	Lalang	107,434,426	41,632,993	0.23%	20,106,915	127,541,000
7	Mengkapan	107,434,426	540,756,448	2.99%	261,161,716	368,596,000
8	Sungai Rawa	107,434,426	37,243,312	0.21%	17,986,891	125,421,000
9	Penyengat	107,434,426	186,661,641	1.03%	90,149,410	197,584,000
10	Teluk Batil	107,434,426	34,742,284	0.19%	16,779,004	124,213,000
11	Bunsur	107,434,426	51,019,198	0.28%	24,640,041	132,074,000
12	Harapan	107,434,426	42,165,335	0.23%	20,364,013	127,798,000
13	Kayu Ara Permai	107,434,426	33,286,532	0.18%	16,075,939	123,510,000
14	Rawa Mekar Jaya	107,434,426	32,490,437	0.18%	15,691,460	123,126,000
					-	-
3	Minas				-	-
1	Minas Timur	107,434,426	589,102,161	3.26%	284,510,581	391,945,000
2	Minas Barat	107,434,426	2,660,713,870	14.71%	1,285,008,441	1,392,442,000
3	Mandi Angin	107,434,426	64,842,960	0.36%	31,316,314	138,751,000
4	Rantau Bertuah	107,434,426	40,926,682	0.23%	19,765,798	127,200,000
					-	-
4	Tualang				-	-
1	Tualang	107,434,426	542,736,593	3.00%	262,118,040	369,552,000
2	Pinang Sebatang	107,434,426	139,122,908	0.77%	67,190,280	174,625,000
3	Maredan	107,434,426	77,545,610	0.43%	37,451,138	144,886,000
4	Pinang Sebatang Timur	107,434,426	210,610,426	1.16%	101,715,625	209,150,000
5	Pinang Sebatang Barat	107,434,426	87,728,804	0.48%	42,369,176	149,804,000
6	Maredan Barat	107,434,426	80,472,980	0.44%	38,864,930	146,299,000
7	Perawang Barat	107,434,426	1,056,734,370	5.84%	510,356,488	617,791,000
8	Tualang Timur	107,434,426	71,033,836	0.39%	34,306,236	141,741,000
					-	-
5	Sungai Mandau				-	-
1	Muara Kelantan	107,434,426	52,921,965	0.29%	25,558,995	132,993,000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
2	Teluk Lancang	107,434,426	49,432,411	0.27%	23,873,693	131,308,000
3	Sungai Selodang	107,434,426	50,127,635	0.28%	24,209,456	131,644,000
4	Olak	107,434,426	104,193,164	0.58%	50,320,742	157,755,000
5	Lubuk Jering	107,434,426	36,954,612	0.20%	17,847,462	125,282,000
6	Muara Bungkal	107,434,426	65,480,911	0.36%	31,624,416	139,059,000
7	Lubuk Umbut	107,434,426	41,369,227	0.23%	19,979,528	127,414,000
8	Bencah Umbai	107,434,426	35,400,144	0.20%	17,096,721	124,531,000
9	Tasik Betung	107,434,426	34,126,718	0.19%	16,481,712	123,916,000
					-	-
6	Dayun				-	-
1	Dayun	107,434,426	798,321,716	4.41%	385,554,477	492,989,000
2	Banjar Seminai	107,434,426	145,577,736	0.80%	70,307,680	177,742,000
3	Teluk Merbau	107,434,426	61,314,079	0.34%	29,612,019	137,046,000
4	Merangkai	107,434,426	39,976,551	0.22%	19,306,926	126,741,000
5	Lubuk Tilan	107,434,426	73,494,835	0.41%	35,494,791	142,929,000
6	Berumbung Baru	107,434,426	66,002,915	0.36%	31,876,522	139,311,000
7	Pangkalan Makmur	107,434,426	91,680,516	0.51%	44,277,680	151,712,000
8	Buana Makmur	107,434,426	81,896,695	0.45%	39,552,522	146,987,000
9	Suka Mulya	107,434,426	77,774,353	0.43%	37,561,611	144,996,000
10	Sawit Permai	107,434,426	95,562,554	0.53%	46,152,534	153,587,000
11	Sialang Sakti	107,434,426	84,237,948	0.47%	40,683,245	148,118,000
					-	-
7	Kerinci Kanan				-	-
1	Kerinci Kanan	107,434,426	79,304,081	0.44%	38,300,403	145,735,000
2	Kerinci Kiri	107,434,426	97,501,312	0.54%	47,088,870	154,523,000
3	Buana Bhakti	107,434,426	78,794,120	0.44%	38,054,114	145,489,000
4	Bukit Harapan	107,434,426	34,779,826	0.19%	16,797,135	124,232,000
5	Kumbara Utama	107,434,426	65,311,859	0.36%	31,542,772	138,977,000
6	Bukit Agung	107,434,426	199,805,986	1.10%	96,497,553	203,932,000
7	Simpang Perak Jaya	107,434,426	96,588,724	0.53%	46,648,130	154,083,000
8	Buatan Baru	107,434,426	122,894,172	0.68%	59,352,511	166,787,000
9	Gabung Makmur	107,434,426	76,965,153	0.43%	37,170,803	144,605,000
10	Jati Mulya	107,434,426	76,949,751	0.43%	37,163,365	144,598,000
11	Seminai	107,434,426	90,919,458	0.50%	43,910,122	151,345,000
12	Delima jaya	107,434,426	71,652,661	0.40%	34,605,102	142,040,000
					-	-
8	Bungaraya				-	-
1	Bunga Raya	107,434,426	174,819,586	0.97%	84,430,215	191,865,000
2	Jati Baru	107,434,426	47,097,547	0.26%	22,746,056	130,180,000
3	Jaya Pura	107,434,426	70,472,112	0.39%	34,034,948	141,469,000
4	Kemuning Muda	107,434,426	64,990,842	0.36%	31,387,735	138,822,000
5	Buantan Lestari	107,434,426	42,667,719	0.24%	20,606,642	128,041,000
6	Tuah Indrapura	107,434,426	33,890,991	0.19%	16,367,867	123,802,000
7	Langsat Permai	107,434,426	58,377,774	0.32%	28,193,912	135,628,000
8	Temusai	107,434,426	63,020,652	0.35%	30,436,219	137,871,000
9	Dayang Suri	107,434,426	47,740,131	0.26%	23,056,396	130,491,000
10	Suak Merambai	107,434,426	45,022,633	0.25%	21,743,963	129,178,000
					-	-
9	Koto Gasib				-	-
1	Pangkalan Pisang	107,434,426	142,661,199	0.79%	68,899,120	176,334,000
2	Kuala Gasib	107,434,426	410,095,232	2.27%	198,058,063	305,492,000
3	Teluk Rimba	107,434,426	104,005,606	0.57%	50,230,159	157,665,000
4	Buatan I	107,434,426	88,492,540	0.49%	42,738,027	150,172,000
5	Buatan II	107,434,426	72,924,077	0.40%	35,219,140	142,654,000
6	Sengkemang	107,434,426	54,300,447	0.30%	26,224,741	133,659,000
7	Rantau Panjang	107,434,426	53,879,967	0.30%	26,021,668	133,456,000
8	Empang Pandan	107,434,426	85,273,826	0.47%	41,183,529	148,618,000
9	KerANJI Guguh	107,434,426	33,664,636	0.19%	16,258,547	123,693,000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
10	Sri Gemilang	107,434,426	41,565,150	0.23%	20,074,150	127,509,000 ✓
11	Tasik Seminai	107,434,426	72,095,179	0.40%	34,818,819	142,253,000 ✓
						-
10	Kandis					-
1	Belutu	107,434,426	57,225,830	0.32%	27,637,573	135,072,000 ✓
2	Kandis	107,434,426	2,329,709,718	12.88%	1,125,147,911	1,232,582,000 ✓
3	Sam-sam	107,434,426	197,808,041	1.09%	95,532,633	202,967,000 ✓
4	Bekalar	107,434,426	84,259,329	0.47%	40,693,571	148,128,000 ✓
5	Jambai Makmur	107,434,426	65,279,706	0.36%	31,527,243	138,962,000 ✓
6	Sungai Gondang	107,434,426	57,067,707	0.32%	27,561,207	134,996,000 ✓
7	Pencing Bekulo	107,434,426	71,036,180	0.39%	34,307,368	141,742,000 ✓
8	Libo Jaya	107,434,426	199,527,423	1.10%	96,363,020	203,797,000 ✓
					-	-
11	Lubuk Dalam				-	-
1	Lubuk Dalam	107,434,426	127,104,901	0.70%	61,386,109	168,821,000 ✓
2	Rawang Kao	107,434,426	89,161,362	0.49%	43,061,039	150,495,000 ✓
3	Sri Gading	107,434,426	81,008,594	0.45%	39,123,608	146,558,000 ✓
4	Sialang Baru	107,434,426	126,440,870	0.70%	61,065,411	168,500,000 ✓
5	Sialang Palas	107,434,426	71,367,926	0.39%	34,467,587	141,902,000 ✓
6	Empang Baru	107,434,426	95,842,635	0.53%	46,287,801	153,722,000 ✓
7	Rawang Kao Barat	107,434,426	202,775,164	1.12%	97,931,537	205,366,000 ✓
					-	-
12	Sabak Auh				-	-
1	Bandar Sungai	107,434,426	56,927,307	0.31%	27,493,400	134,928,000 ✓
2	Rempak	107,434,426	39,045,675	0.22%	18,857,354	126,292,000 ✓
3	Belading	107,434,426	34,426,129	0.19%	16,626,315	124,061,000 ✓
4	Sungai Tengah	107,434,426	83,124,223	0.46%	40,145,365	147,580,000 ✓
5	Laksamana	107,434,426	37,734,908	0.21%	18,224,310	125,659,000 ✓
6	Sabak Permai	107,434,426	38,737,911	0.21%	18,708,717	126,143,000 ✓
7	Bandar Pedada	107,434,426	78,237,855	0.43%	37,785,463	145,220,000 ✓
8	Selat Guntung	107,434,426	44,236,534	0.24%	21,364,311	128,799,000 ✓
					-	-
13	Mempura				-	-
1	Kota Ringin	107,434,426	90,506,980	0.50%	43,710,913	151,145,000 ✓
2	Paluh	107,434,426	44,091,413	0.24%	21,294,224	128,729,000 ✓
3	Benteng Hilir	107,434,426	47,676,982	0.26%	23,025,897	130,460,000 ✓
4	Benteng Hulu	107,434,426	95,248,500	0.53%	46,000,860	153,435,000 ✓
5	Kampung Tengah	107,434,426	64,867,869	0.36%	31,328,344	138,763,000 ✓
6	Merempan Hilir	107,434,426	220,910,777	1.22%	106,690,244	214,125,000 ✓
7	Teluk Merempan	107,434,426	66,463,153	0.37%	32,098,796	139,533,000 ✓
					-	-
14	Pusako				-	-
1	Sungai Berbari	107,434,426	50,388,011	0.28%	24,335,206	131,770,000 ✓
2	Sungai Limau	107,434,426	43,773,277	0.24%	21,140,579	128,575,000 ✓
3	Dosan	107,434,426	44,032,238	0.24%	21,265,645	128,700,000 ✓
4	Benayah	107,434,426	32,414,735	0.18%	15,654,899	123,089,000 ✓
5	Pebadaran	107,434,426	41,118,487	0.23%	19,858,431	127,293,000 ✓
6	Dusun Pusaka	107,434,426	47,462,297	0.26%	22,922,214	130,357,000 ✓
7	Perincit	107,434,426	41,260,916	0.23%	19,927,218	127,362,000 ✓
122	JUMLAH	13,107,000,000	18,092,735,462	100.00%	8,738,000,000	21,845,000,000

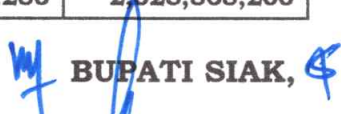
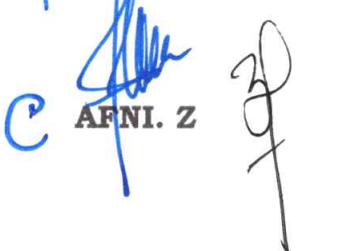
 **BUPATI SIAK,** 
 **AFNI. Z** 

PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KAMPUNG SE - KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	KECAMATAN / KAMPUNG	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG				
		ALOKASI DASAR (60%) (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			DANA BAGI HASIL RETRIBUSI SETIAP KAMPUNG (Rp.)
			REALISASI PENERIMAAN PAJAK SETIAP KAMPUNG (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
1	Siak					
1	Langkai	9,963,286	99,855,463	0.55%	4,472,381	14,436,000
2	Tumang	9,963,286	48,709,243	0.27%	2,181,616	12,145,000
3	Merempan Hulu	9,963,286	180,266,583	1.00%	8,073,878	18,037,000
4	Rawang Air Putih	9,963,286	64,022,765	0.35%	2,867,486	12,831,000
5	Suak Lanjut	9,963,286	114,275,774	0.63%	5,118,246	15,082,000
6	Buantan Besar	9,963,286	540,540,028	2.99%	24,210,001	34,173,000
2	Sungai Apit					
1	Teluk Lanus	9,963,286	32,166,118	0.18%	1,440,674	11,404,000
2	Tanjung Kuras	9,963,286	47,919,960	0.26%	2,146,265	12,110,000
3	Parit I/II	9,963,286	56,493,408	0.31%	2,530,257	12,494,000
4	Teluk Masjid	9,963,286	61,410,313	0.34%	2,750,479	12,714,000
5	Sungai Kayu Ara	9,963,286	42,833,224	0.24%	1,918,438	11,882,000
6	Lalang	9,963,286	41,632,993	0.23%	1,864,681	11,828,000
7	Mengkapan	9,963,286	540,756,448	2.99%	24,219,694	34,183,000
8	Sungai Rawa	9,963,286	37,243,312	0.21%	1,668,074	11,631,000
9	Penyengat	9,963,286	186,661,641	1.03%	8,360,303	18,324,000
10	Teluk Batil	9,963,286	34,742,284	0.19%	1,556,056	11,519,000
11	Bunsur	9,963,286	51,019,198	0.28%	2,285,076	12,248,000
12	Harapan	9,963,286	42,165,335	0.23%	1,888,524	11,852,000
13	Kayu Ara Permai	9,963,286	33,286,532	0.18%	1,490,855	11,454,000
14	Rawa Mekar Jaya	9,963,286	32,490,437	0.18%	1,455,199	11,418,000
3	Minas					
1	Minas Timur	9,963,286	589,102,161	3.26%	26,385,028	36,348,000
2	Minas Barat	9,963,286	2,660,713,870	14.71%	119,169,500	129,128,000
3	Mandi Angin	9,963,286	64,842,960	0.36%	2,904,222	12,868,000
4	Rantau Bertuah	9,963,286	40,926,682	0.23%	1,833,047	11,796,000
4	Tualang					
1	Tualang	9,963,286	542,736,593	3.00%	24,308,382	34,272,000
2	Pinang Sebatang	9,963,286	139,122,908	0.77%	6,231,113	16,194,000
3	Maredan	9,963,286	77,545,610	0.43%	3,473,155	13,436,000
4	Pinang Sebatang Timur	9,963,286	210,610,426	1.16%	9,432,934	19,396,000
5	Pinang Sebatang Barat	9,963,286	87,728,804	0.48%	3,929,245	13,893,000
6	Maredan Barat	9,963,286	80,472,980	0.44%	3,604,268	13,568,000
7	Perawang Barat	9,963,286	1,056,734,370	5.84%	47,329,594	57,293,000
8	Tualang Timur	9,963,286	71,033,836	0.39%	3,181,502	13,145,000
5	Sungai Mandau					
1	Muara Kelantan	9,963,286	52,921,965	0.29%	2,370,298	12,334,000
2	Teluk Lancang	9,963,286	49,432,411	0.27%	2,214,006	12,177,000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
3	Sungai Selodang	9,963,286	50,127,635	0.28%	2,245,144	12,208,000
4	Olak	9,963,286	104,193,164	0.58%	4,666,660	14,630,000
5	Lubuk Jering	9,963,286	36,954,612	0.20%	1,655,143	11,618,000
6	Muara Bungkal	9,963,286	65,480,911	0.36%	2,932,795	12,896,000
7	Lubuk Umbut	9,963,286	41,369,227	0.23%	1,852,867	11,816,000
8	Bencah Umbai	9,963,286	35,400,144	0.20%	1,585,521	11,549,000
9	Tasik Betung	9,963,286	34,126,718	0.19%	1,528,486	11,492,000
6	Dayun					
1	Dayun	9,963,286	798,321,716	4.41%	35,755,667	45,719,000
2	Banjar Seminai	9,963,286	145,577,736	0.80%	6,520,215	16,484,000
3	Teluk Merbau	9,963,286	61,314,079	0.34%	2,746,168	12,709,000
4	Merangkai	9,963,286	39,976,551	0.22%	1,790,492	11,754,000
5	Lubuk Tilan	9,963,286	73,494,835	0.41%	3,291,727	13,255,000
6	Berumbung Baru	9,963,286	66,002,915	0.36%	2,956,174	12,919,000
7	Pangkalan Makmur	9,963,286	91,680,516	0.51%	4,106,237	14,070,000
8	Buana Makmur	9,963,286	81,896,695	0.45%	3,668,034	13,631,000
9	Suka Mulya	9,963,286	77,774,353	0.43%	3,483,400	13,447,000
10	Sawit Permai	9,963,286	95,562,554	0.53%	4,280,108	14,243,000
11	Sialang Sakti	9,963,286	84,237,948	0.47%	3,772,895	13,736,000
7	Kerinci Kanan					
1	Kerinci Kanan	9,963,286	79,304,081	0.44%	3,551,914	13,515,000
2	Kerinci Kiri	9,963,286	97,501,312	0.54%	4,366,942	14,330,000
3	Buana Bhakti	9,963,286	78,794,120	0.44%	3,529,074	13,492,000
4	Bukit Harapan	9,963,286	34,779,826	0.19%	1,557,738	11,521,000
5	Kumbara Utama	9,963,286	65,311,859	0.36%	2,925,223	12,889,000
6	Bukit Agung	9,963,286	199,805,986	1.10%	8,949,019	18,912,000
7	Simpang Perak Jaya	9,963,286	96,588,724	0.53%	4,326,068	14,289,000
8	Buatan Baru	9,963,286	122,894,172	0.68%	5,504,251	15,468,000
9	Gabung Makmur	9,963,286	76,965,153	0.43%	3,447,157	13,410,000
10	Jati Mulya	9,963,286	76,949,751	0.43%	3,446,467	13,410,000
11	Seminai	9,963,286	90,919,458	0.50%	4,072,150	14,035,000
12	Delima jaya	9,963,286	71,652,661	0.40%	3,209,218	13,173,000
8	Bungaraya					
1	Bunga Raya	9,963,286	174,819,586	0.97%	7,829,915	17,793,000
2	Jati Baru	9,963,286	47,097,547	0.26%	2,109,431	12,073,000
3	Jaya Pura	9,963,286	70,472,112	0.39%	3,156,343	13,120,000
4	Kemuning Muda	9,963,286	64,990,842	0.36%	2,910,845	12,874,000
5	Buantan Lestari	9,963,286	42,667,719	0.24%	1,911,025	11,874,000
6	Tuah Indrapura	9,963,286	33,890,991	0.19%	1,517,928	11,481,000
7	Langsat Permai	9,963,286	58,377,774	0.32%	2,614,656	12,578,000
8	Temusai	9,963,286	63,020,652	0.35%	2,822,603	12,786,000
9	Dayang Suri	9,963,286	47,740,131	0.26%	2,138,211	12,101,000
10	Suak Merambai	9,963,286	45,022,633	0.25%	2,016,498	11,980,000
9	Koto Gasib					
1	Pangkalan Pisang	9,963,286	142,661,199	0.79%	6,389,587	16,353,000
2	Kuala Gasib	9,963,286	410,095,232	2.27%	18,367,568	28,331,000
3	Teluk Rimba	9,963,286	104,005,606	0.57%	4,658,260	14,622,000
4	Buatan I	9,963,286	88,492,540	0.49%	3,963,452	13,927,000
5	Buatan II	9,963,286	72,924,077	0.40%	3,266,163	13,229,000
6	Sengkemang	9,963,286	54,300,447	0.30%	2,432,038	12,395,000
7	Rantau Panjang	9,963,286	53,879,967	0.30%	2,413,205	12,376,000
8	Empang Pandan	9,963,286	85,273,826	0.47%	3,819,291	13,783,000
9	KerANJI Guguh	9,963,286	33,664,636	0.19%	1,507,790	11,471,000
10	Sri Gemilang	9,963,286	41,565,150	0.23%	1,861,643	11,825,000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
11	Tasik Seminai	9,963,286	72,095,179	0.40%	3,229,038	13,192,000
10	Kandis					
1	Belutu	9,963,286	57,225,830	0.32%	2,563,062	12,526,000 ✓
2	Kandis	9,963,286	2,329,709,718	12.88%	104,344,306	114,308,000 ✓
3	Sam-sam	9,963,286	197,808,041	1.09%	8,859,534	18,823,000
4	Bekalar	9,963,286	84,259,329	0.47%	3,773,853	13,737,000
5	Jambai Makmur	9,963,286	65,279,706	0.36%	2,923,783	12,887,000
6	Sungai Gondang	9,963,286	57,067,707	0.32%	2,555,980	12,519,000
7	Pencing Bekulo	9,963,286	71,036,180	0.39%	3,181,607	13,145,000
8	Libo Jaya	9,963,286	199,527,423	1.10%	8,936,543	18,900,000
11	Lubuk Dalam					
1	Lubuk Dalam	9,963,286	127,104,901	0.70%	5,692,843	15,656,000 ✓
2	Rawang Kao	9,963,286	89,161,362	0.49%	3,993,408	13,957,000
3	Sri Gading	9,963,286	81,008,594	0.45%	3,628,257	13,592,000
4	Sialang Baru	9,963,286	126,440,870	0.70%	5,663,102	15,626,000
5	Sialang Palas	9,963,286	71,367,926	0.39%	3,196,466	13,160,000
6	Empang Baru	9,963,286	95,842,635	0.53%	4,292,652	14,256,000 ✓
7	Rawang Kao Barat	9,963,286	202,775,164	1.12%	9,082,004	19,045,000 ✓
12	Sabak Auh					
1	Bandar Sungai	9,963,286	56,927,307	0.31%	2,549,691	12,513,000 ✓
2	Rempak	9,963,286	39,045,675	0.22%	1,748,799	11,712,000 ✓
3	Belading	9,963,286	34,426,129	0.19%	1,541,896	11,505,000
4	Sungai Tengah	9,963,286	83,124,223	0.46%	3,723,013	13,686,000
5	Laksamana	9,963,286	37,734,908	0.21%	1,690,092	11,653,000
6	Sabak Permai	9,963,286	38,737,911	0.21%	1,735,015	11,698,000
7	Bandar Pedada	9,963,286	78,237,855	0.43%	3,504,160	13,467,000 ✓
8	Selat Guntung	9,963,286	44,236,534	0.24%	1,981,290	11,945,000
13	Mempura					
1	Kota Ringin	9,963,286	90,506,980	0.50%	4,053,676	14,017,000 ✓
2	Paluh	9,963,286	44,091,413	0.24%	1,974,790	11,938,000
3	Benteng Hilir	9,963,286	47,676,982	0.26%	2,135,383	12,099,000
4	Benteng Hulu	9,963,286	95,248,500	0.53%	4,266,042	14,229,000 ✓
5	Kampung Tengah	9,963,286	64,867,869	0.36%	2,905,337	12,869,000
6	Merempan Hilir	9,963,286	220,910,777	1.22%	9,894,272	19,858,000
7	Teluk Merempan	9,963,286	66,463,153	0.37%	2,976,788	12,940,000 ✓
14	Pusako					
1	Sungai Berbari	9,963,286	50,388,011	0.28%	2,256,806	12,220,000 ✓
2	Sungai Limau	9,963,286	43,773,277	0.24%	1,960,541	11,924,000 ✓
3	Dosan	9,963,286	44,032,238	0.24%	1,972,140	11,935,000 ✓
4	Benayah	9,963,286	32,414,735	0.18%	1,451,809	11,415,000 ✓
5	Pebadaran	9,963,286	41,118,487	0.23%	1,841,637	11,805,000 ✓
6	Dusun Pusaka	9,963,286	47,462,297	0.26%	2,125,767	12,089,000 ✓
7	Perincit	9,963,286	41,260,916	0.23%	1,848,016	11,817,200 ✓
122	JUMLAH	1,215,520,920	18,092,735,462	100.00%	810,347,280	2,025,868,200

W
BUPATI SIAK, 
C
AFNI. Z 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA

KOP KAMPUNG

Siak Sri Indrapura,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPD dan DBHRD) kepada Kampung Tahap (.....) Tahun 2026

Yth. **BUPATI SIAK**
c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak
di-
Tempat

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan
Nomor Tahun Tanggal tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun Anggaran 2026**, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPD dan DBHRD) kepada Kampung Tahap (.....) Tahun 2026 sebesar **Rp..... (terbilang.....)**

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

B. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN

KOP KECAMATAN

Siak Sri Indrapura,

Yth. **BUPATI SIAK**
c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor :.....

No	NASKAH DINAS/BARANG YANG DIKIRIMKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan berkas Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPD dan DBHRD kepada Kampung Tahap (.....) Tahun 2026 Kampung.....	rangkap	Berkas telah diverifikasi dengan lengkap dan benar.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP.....

C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA TAHAP I (PERTAMA)

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung Tahun Sebelumnya.		
2.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penghulu (dibubuhi materai).		
3.	Nota Dinas Penyaluran Dana;		
4.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;		
5.	Surat permohonan penyaluran dana;		
6.	Surat pengantar Kecamatan;		
7.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ (DBHPD dan DBHRD) tahun sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
8.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran (DBHPD dan DBHRD) oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
9.	Rekening koran terakhir (1 halaman);		
10.	SP2D Terakhir;		
11.	Spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;		
12.	Buku Cek Kampung;		

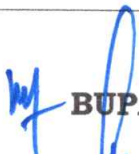
TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

D. **FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA UNTUK TAHAP TAHAP SELANJUTNYA**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)		
2.	Nota Dinas Penyaluran Dana;		
3.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;		
4.	Surat permohonan penyaluran dana;		
5.	Surat pengantar Kecamatan;		
6.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan SPJ (DBHPD dan DBHRD) tahap sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
7.	Lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran (DBHPD dan DBHRD) oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;		
8.	Rekening koran terakhir (1 halaman);		
9.	SP2D Terakhir; dan		
10.	Laporan Realisasi APBKampung tahap sebelumnya.		

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

 **BUPATI SIAK,**
 **AFNI. Z**
